



# LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

---

TAHUNAN T.A. 2023

**KPKNL PALANGKARAYA**

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Persediaan, Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang, Neraca, dan Catatan atas Laporan BMN.

Penyusunan Laporan BMN KPKNL Palangka Raya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangkaraya, 19 Januari 2024  
Kepala KPKNL Palangkaraya  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik  
Fredy Himarwanto



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG  
PERIODE TAHUNAN 2023**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- h. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- r. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.06/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- s. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- t. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BARang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- u. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## 2. Entitas Pelaporan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah salah satu unit eselon I vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-Lain, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang yang berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara disertai dengan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1).

## 3. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk CaLBMN ini adalah periode Laporan Tahunan 2023.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) periode Tahunan maupun Semesteran kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Milik Negara KPKNL Palangkaraya TAHUNAN 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain :

- 1. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset Tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi
- 3. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap. Laporan Barang Milik Negara Ditjen Kekayaan Negara Tahunan 2023 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 4. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

5. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
6. Kebijakan Amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan 2023 UAPPB-E1 Ditjen Kekayaan Negara merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh unit KPKNL Palangkaraya.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan 2023 ini adalah sebesar Rp25.483.451.690,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp23.256.192.244,- dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan 2023 sebesar Rp2.227.259.446,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan. sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Pembantu E1 (LBPP E1) Tahunan 2023 merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 90 (Sembilan puluh) Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1 (satu) satker Kantor Pusat, 88 (delapan puluh delapan) satker Kantor Daerah dan 1 (satu) satker Badan Layanan Umum (sebagaimana daftar satker terlampir).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; dan
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN 2023

1. Saldo Awal Tahunan 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2023 pada KPKNL Palangkaraya adalah sebesar Rp23.256.192.244,- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp23.256.192.244,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan 2023

Mutasi BMN Tahunan 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp 57.772.714 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp50.082.884,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp7.689.830

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	50.082.884	-4.625.311	45.457.573
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai Materai dan Leges	0	0	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH		50.082.884	-4.625.311	45.457.573

a. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan 2023 sebesar Rp12.147.303.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 4.368 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp11.647.361.000,-. Dengan mutasi tambah sebesar 573 m<sup>2</sup> senilai Rp499.942.500,- dan mutasi kurang sebesar 0 m<sup>2</sup> senilai Rp0,-.

Rincian mutasi Tanah per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Tanah (2.01)

Saldo Tanah Persil pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan 2023 sebesar Rp12.147.303.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 4.368 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp11.647.361.000,-. Dengan mutasi tambah sebesar 573 m<sup>2</sup> senilai Rp499.942.500,- dan mutasi kurang sebesar 0 m<sup>2</sup> senilai Rp0,-.

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	499.942.500	0
Transfer Masuk (102)	0	0
Reklasifikasi Masuk (105)	0	0
Pengembangan Nilai Aset (202)	0	0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pengurangan Nilai Aset (201)	0	0
Transfer Keluar (302)	0	0
Reklasifikasi Keluar (304)	0	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak ada jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan juga tidak ada.

Rincian data Tanah Persil berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )
Baik	4.941
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Tanah persil yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah tidak ada.

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah tidak ada.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 adalah sebesar Rp3.874.719.956,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.011.954.244,00. Mutasi tambah sebesar Rp334.356.446,- dan mutasi kurang sebesar Rp471.590.734,-

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp130.659.100,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 unit dengan nilai sebesar Rp130.659.100,-. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,-.

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	0
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0 .

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp846.217.212,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 8 unit dengan nilai sebesar Rp1.053.517.212,- mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- dan mutasi kurang jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp207.300.000,- yang masih proses penerbitan persetujuan penjualan pada pengelola (Seksi PKN KPKNL Palangkaraya).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0
Transfer Masuk (102)	0	0
Pembatalan Penghapusan (106)	0	0
Pengembangan Nilai Aset (202)	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan (301)	207.300.000	0
Transfer Keluar (302)	0	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	7
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/ dengan jumlah nilai perolehan Rp207.300.000,-.

3) Alat Ukur (3.03.03)

Saldo Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp4.999.572. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar Rp4.999.572. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian(101)	0	0

Mutasi Kurang Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	5
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0

4) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp631.165.712. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 180 unit dengan nilai sebesar Rp 662.963.712. Mutasi tambah jumlah barang 7 unit dengan nilai sebesar Rp22.242.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp54.040.000,-

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	22.242.000	0
Transfer Masuk (102)	0	0
Reklasifikasi Masuk (107)	0	0
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aset (402)	0	0

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghapusan (301)	54.040.000	0
Transfer Keluar (302)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Kantor di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	95
Rusak Ringan	88
Rusak Berat	2

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0 .

5) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp906.122.321,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 338 unit dengan nilai sebesar Rp812.230.821,-. Mutasi tambah jumlah barang 30 unit dengan nilai sebesar Rp118.524.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp24.632.500,-.

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	105.646.000	0
Transfer Masuk (102)	2.800.000	378.000
Penyelesaian Pembangunan Degan KDP (105)	0	0
Reklasifikasi Masuk (107)	0	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (204)	0	0
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif (402)	0	0
Perolehan Lainnya (112)	9.700.000	0

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (264)	9.700.000	0
Transfer Keluar (302)	0	0
Reklasifikasi Keluar (304)	0	0
Koreksi Pencatatan (305)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	14.932.500	0

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas. berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	235
Rusak Ringan	129
Rusak Berat	2

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2 unit/Rp14.932.500,-.

6) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp221.420.298,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 26 unit dengan nilai sebesar Rp216.331.762,-. Mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp13.778.536,- dan mutasi kurang jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp8.690.000,-.

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0
Transfer Masuk (102)	13.778.536	0
Reklasifikasi Masuk (107)	0	0

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (264)	0	0
Transfer Keluar (302)	0	0

Reklasifikasi Keluar (304)	0	0
Koreksi Pencatatan (305)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	8.690.000	0

Dari jumlah Alat Studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	16
Rusak Ringan	8
Rusak Berat	2

Kelompok barang Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 2 unit/Rp8.690.000,-.

7) Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp22.639.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai sebesar Rp22.639.000. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0.

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1
Rusak Ringan	3
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 /Rp 0 .

8) Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp 16.390.000 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp 16.390.000 . Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 dan dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0

Mutasi Tambah Unit Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar (304)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	0	0

Dari jumlah Unit Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Unit Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	2
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Unit Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0 .

9) Alat Khusus Kepolisian (3.09.04)

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada Laporan Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp7.319.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0. Mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp7.319.000 dan Mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	7.319.000	0

Mutasi Kurang Alat Khusus Kepolisian tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar (304)	0	0

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Alat Khusus Kepolisian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Alat Khusus Kepolisian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah tidak ada 0 unit/Rp0.

10) Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp549.735.450,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 61 unit dengan nilai sebesar Rp680.393.239,-. Mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp23.500.000 dan mutasi kurang jumlah barang 13 unit dengan nilai sebesar Rp154.157.789,-.

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0
Transfer Masuk (102)	23.500.000	0

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar (302)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	154.157.789	0

Dari jumlah Komputer Unit di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak ada dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Komputer Unit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	38
Rusak Ringan	1

Rusak Berat	11
-------------	----

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 13 unit/Rp154.157.789,-.

11) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang kuasa pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp538.052.291,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 41 unit dengan nilai sebesar Rp411.829.826. Mutasi tambah jumlah barang 14 unit dengan nilai sebesar Rp148.992.910,- dan mutasi kurang jumlah barang 5 unit dengan nilai sebesar Rp22.770.445,-.

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	0	0
Transfer Masuk (102)	147.010.982	1.981.928
Reklasifikasi Masuk (107)	0	0
Perolehan Lainnya (112)	0	0
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif (402)	0	0

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar (304)	0	0
Koreksi Pencatatan (305)	0	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	22.770.445	0

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak ada dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	40
Rusak Ringan	8
Rusak Berat	0

Kelompok barang Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 unit/Rp22.770.445,-.

12) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada UAKPB KPKNL Palangka Raya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.343.374.052,- terdiri sebesar Rp3.343.012.910,- untuk BMN Intrakomptabel dan Rp361.142,- untuk BMN Ekstrakomptabel

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp8.996.897.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 12 unit dengan nilai sebesar Rp7.398.840.000 mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar Rp3.296.543.125,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp1.698.485.625,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp 6.806.517.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 9 unit dengan nilai sebesar Rp 6.806.517.000. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
102 Transfer Masuk	0	0
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	0	0
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	0
208 Pengembangan Melalui KDP	0	0

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
305 Koreksi Pencatatan	0	0
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	9
Rusak Ringan	0

Rusak Berat	0
-------------	---

Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0.

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp1.865.900.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp267.843.000,-. Mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar Rp3.296.543.125,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp1.698.485.625,-.

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
100 Saldo Awal	0	0
102 Transfer Masuk	0	0
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.098.000.000	0
112 Perolehan Lainnya	1.198.543.125	0

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.698.485.625	0
304 Reklasifikasi Keluar	0	0
305 Koreksi Pencatatan	0	0
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	6
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0.

3) Tugu/Tanda Batas (4.04.01)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp 324.480.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp324.480.000. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan tanpa mutasi kurang.

Mutasi Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
101 Pembelian	0	0
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0	0

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan tidak ada.

Dari jumlah Tambah Tugu/Tanda Batas di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Tugu/Tanda Batas yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah tidak ada.

4) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 adalah 16 unit Rp1.078.656.044,-.

d. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 adalah sejumlah 3 unit dengan nilai sebesar Rp2.640.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 unit dengan nilai sebesar Rp2.640.000 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai Rp0 dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai Rp0.

Rincian Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Kartografi, Naskah, dan Lukisan (6.01.03)

Saldo Kartografi, Naskah, dan Lukisan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 2023 sebesar Rp2.640.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 3 unit dengan nilai sebesar Rp2.640.000. Mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan tanpa mutasi kurang.

Dari jumlah Kartografi, Naskah, dan Lukisan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	3
Rusak Ringan	0
Rusak Berat	0

Kelompok barang Kartografi, Naskah, dan Lukisan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah tidak ada.

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Palangkaraya Tahunan Tahun 2023.

a. Nilai BMN Gabungan per akun neraca

Nilai BMN Gabungan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun 2023 adalah sebesar Rp23.146.292.244. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	12.147.303.500		0	0,00%	12.147.303.500	47,93%
2	Peralatan dan Mesin	3.872.360.028		2.359.928	100,00%	3.874.719.956	16,86%
3	Gedung dan Bangunan	8.996.897.500		0	0,00%	8.996.897.500	30,45%
4	Jalan dan Jembatan	0		0	0,00%	0	0,00%
5	Irigasi	0		0	0,00%	0	0,00%
6	Jaringan	0		0	0,00%	0	0,00%
7	ATR	0		0	0,00%	0	0,00%
8	Aset Tetap Lainnya	2.640.000		0	0,00%	2.640.000	0,01%
9	KDP	0		0	0,00%	0	4,75%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Aset Tak Berwujud	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	461.890.734	1,81%	0	0,00%	461.890.734	1,81%
	Total	25.481.091.762	100,00%	2.359.928	100,00%	25.483.451.690	100,00%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna pada Tahunan tahun 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	3.343.012.910	68,45%	361.142	100,00%	3.343.374.052	68,46%
2	Gedung dan Bangunan	1.078.656.044	22,09%	0	0,00%	1.078.656.044	22,09%
3	Jalan dan Jembatan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Irigasi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Jaringan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	ATR	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Aset Tetap Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Aset Tak Berwujud	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	461890734	9,46%	0	0,00%	461.890.734	9,46%
Total		4.883.559.688	100%	361.142	100%	4.883.920.830	100%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuas Pengguna Tahunan Tahun 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	Laporan Barang/Aset	Laporan Keuangan	SELISIH
117111	Barang Konsumsi	45.457.573	45.457.573	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
117199	Persediaan Lainnya	0	0	-
131111	Tanah	12.147.303.500	12.147.303.500	-
132111	Peralatan dan Mesin	3.872.360.028	3.872.360.028	-
133111	Gedung dan Bangunan	8.996.897.500	8.996.897.500	-

134111	Jalan dan Jembatan	0	0	-
134112	Irigasi	0	0	-
134113	Jaringan	0	0	-
135121	Aset Tetap Lainnya	2.640.000	2.640.000	-
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	-
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.343.012.910)	(3.343.012.910)	-
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.078.656.044)	(1.078.656.044)	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	-
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0	-
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
162151	Software	0	0	-
162161	Lisensi	0	0	-
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	-
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	461.890.734	461.890.734	-
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(461.890.734)	(461.890.734)	-
169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	0	-
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	0	-
<b>J U M L A H</b>		<b>20.642.989.647</b>	<b>20.642.989.647</b>	<b>-</b>

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN setelah dikurangi penyusutan secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN pada Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel (setelah penyusutan)	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahunan TA 2018	21.663.553.734,00	0	0,00%
2	Tahunan TA 2019	22.083.481.112,00	55.175.200,00	0,25%
3	Tahunan TA 2020	22.340.219.412,00	311.907.200,00	1,40%
4	Tahunan TA 2021	22.434.159.014,00	27.291.550,00	0,12%
5	Tahunan TA 2022	23.227.792.244,00	40.745.000,00	0,18%
6	Tahunan TA 2023	20.599.530.860,00	(2.628.261.384,00)	-11,32%

### 2. Data Pengelolaan BMN (PSP, Pemindahtanganan, Penghapusan, Pemanfaatan dll)

Untuk Tahunan 2023, BMN yang telah terbit PSP nya sebanyak 77 unit BMN, sedangkan BMN yang belum PSP sebanyak 17 unit dan akan diajukan PSP pada bulan Februari 2023 untuk 15 unit barang TIK yang telah terbit BAST dan 2 unit BMN (Laptop) masih menunggu BAST dari Kantor Pusat DJKN. Penghapusan BMN dari catatan sebanyak 5 unit yang terdiri dari 1 sepeda motor, 1 mobil dinas dan 3 barang inventaris. Usulan pemindahtanganan melalui penjualan telah diterbitkan persetujuannya untuk barang inventaris sebanyak 24 NUP dan masih menunggu persetujuan

penjualan 1 unit kendaraan dinas roda 4. Selama Tahunan 2023 tidak ada permohonan dan persetujuan pemanfaatan.

3. Permasalahan Terkait Penatausahaan BMN

Permasalahan yang ditemui pada saat penyusunan laporan Barang Milik Negara pada Tahunan tahun 2023 yaitu:

- 1) banyak sekali BMN kategori IT (Laptop, PC, Printer, scanner, camera, dll) yang sudah usang dan rusak baik dari sisi teknologi maupun operating sistem yang digunakan. Hal ini sangat mengganggu pekerjaan, karena BMN tersebut digunakan sebagai alat utama dalam mengerjakan tuis KPKNL sehari-hari;
- 2) Masih terpisah antara RKBMN dan Penganggaran khususnya untuk belanja modal, sehingga saat terjadi atau dilakukan penjualan/penghapusan BMN belum tentu langsung dapat atau bahkan tidak mendapatkan BMN pengganti.

4. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

KPKNL Palangka Raya berencana melakukan pemeriksaan atas BMN peralatan dan mesin kategori IT tersebut, yang terindikasi dalam kondisi rusak berat agar dapat ditindaklanjuti dengan memasukkan data pada Rencana Pemindahtanganan di RP4 dan melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan di tahun 2024 dan 2025.

UAKPB

Kepala KPKNL Palangkaraya



Ditandatangani secara elektronik

Fredy Himarwanto

